

# PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN FAIRNESS TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PEMANFAATAN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM SEBAGAI PEMODERASI

Wahyuni Arifin<sup>\*1</sup>, Saiful Muchlis<sup>2</sup>, Suhartono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

**Abstract,** *The purpose of this research was to examine the effect of accountability, transparency, and fairness on the performance of government agencies by using the accounting system as a moderating variable. This research is a quantitative research with a descriptive approach. The population in this study were all employees who worked at BPKAD South Sulawesi Province. The sampling technique was using purposive sampling method. The sample in this study were employees who worked at BPKAD South Sulawesi Province with the provision that the respondents concerned had worked at least one year at BPKAD South Sulawesi Province, while the sample in this study amounted to 50 employees. The results showed that accountability, transparency and fairness had a positive effect on the performance of government agencies. Analysis of moderating variables with the interactive test approach shows that the use of accounting systems is able to moderate the accountability and transparency hypotheses on the performance of government agencies, but the use of accounting systems does not moderate fairness to the performance of government agencies.*

**Keywords:** *accountability, transparency, fairness, performance of government agencies, accounting system*

**Abstrak,** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan fairness terhadap kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan *accounting system* sebagai variabel *moderating*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel di dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan bahwa responden yang bersangkutan minimal telah bekerja selama satu tahun pada BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *akuntabilitas, transparansi, dan fairness* berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Analisis variabel *moderating* dengan pendekatan uji interaksil menunjukkan bahwa *pekerjaan accounting system* mampu memoderasi hipotesis akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah, namun pemanfaatan *accounting system* tidak memoderasi *fairness* terhadap kinerja instansi pemerintah.

**Keywords:** *Akuntabilitas, Transparansi, Fairness, Kinerja Instansi Pemerintah, Accounting system.*

## PENDAHULUAN

Isu tentang kinerja pemerintah daerah saat ini menjadi sorotan publik karena belum menampilkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Keadaan negara saat ini sangat memprihatinkan hal ini disebabkan oleh kurang adanya penerapan sistem pemerintahan yang baik, baik

**\*Koresponden:**

Wahyuni\_arifin01@yahoo.com

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bukan saja sistemnya yang belum tertata tetapi krisis multidimensi yang dihadapi oleh negara saat ini (Azlim dkk, 2012)

Maraknya beberapa kasus terkait kinerja pemerintah dapat dilihat kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Sulsel Erwin Syafruddin Haija. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan bahwa Erwin Syafruddin Haija sebagai tersangka. Erwin diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi fee atau uang jasa anggaran sosialisasi sebesar 30% dilingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se-kota Makassar. Hasil penghitungan kerugian Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp20,475 miliar.). Selain itu, kasus terkait buruknya kinerja pemerintahan yang baru-baru ini terjadi, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah non-aktifkan Jumras dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan barang dan Jasa Sulawesi Selatan. Pemecatan ini dilakukan karena dinilai tidak punya integritas dan menghambat kinerja pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (*extra ordinary*) untuk memperbaiki keadaan, sehingga diperlukan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah yang tidak biasa pula. Jangan sampai timbul kesan bagi para pejabat pemerintah, asalkan tidak melanggar undang-undang dan haluan negara yang penting tetap bertahan sampai akhir masa jabatan. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntability) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan (Istiqomahunnisa, 2017)

Boy dkk (2009) transparansi dan akuntabilitas public merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Transparansi dan akuntabilitas publik kini menjadi kajian yang marak, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang partisipatif sebagai suatu konsekuensi logis. Isu seputar transparansi dan akuntabilitas tidak terlepas dari maraknya penyalagunaan wewenang dan penyelewengan dana oleh oknum pegawai maupun pejabat pemerintahan. Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintahan itu melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja *non* keuangan. Hutapea dan Widyaningsih (2017) kinerja keuangan dapat diukur dengan melihat laporan keuangan yang dibuat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Akuntabilitas juga harus dibarengi dengan penerapan prinsip transparansi, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa-apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasinya (Pratolo, 2008). Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya penyelewengan sumber daya maupun pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi dan pelanggaran lainnya. Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong kinerja pemerintah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program-program pemerintah serta dalam pengambilan keputusan publik (Lestiawan dan Jatmiko, 2016).

Pada aspek akuntabilitas, apabila akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakat diterapkan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan memunculkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga masyarakat akan menilai baik terhadap kinerja pemerintahan. Pada aspek transparansi, apabila informasi-informasi yang menjadi hak publik disampaikan oleh pemerintah secara transparan, akan menimbulkan suatu kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik (Auditya dan Lismawati, 2013). Dengan akuntabilitas dan transparansi yang baik, keadilan pada pelayanan publik dapat dicapai. Keadilan bisa diwujudkan apabila ada aturan yang disampaikan secara transparan dan hasil pelaksanaan yang disampaikan kepada

masyarakat secara jelas sehingga masyarakat akan dapat membandingkan kualitas pelayanan yang diterimanya terhadap orang lain. Keterwujudan akuntabilitas, transparansi dan keadilan pemerintah pada akhirnya akan dapat memberikan input pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mempersepsikan bahwa kinerja pemerintah adalah baik (Pratolo, 2010).

Penelitian ini tertuju pada elemen pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik melalui prinsip akuntabilitas, transparansi dan keadilan. Namun ketiga prinsip tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan harapan apabila tidak didukung dengan teknologi informasi yang cukup memadai. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai pendukung yang sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Pada saat SIA yang terintegritasi dengan TI yang digunakan oleh suatu organisasi dalam pengolahan data tidak berjalan dengan baik maka dapat menghasilkan *output* yang dapat melemahkan kinerja dari organisasi tersebut seperti halnya dalam lingkungan pemerintahan (Alfian, 2014).

Penggunaan sistem informasi pada organisasi pemerintahan atau sektor publik masih belum optimal disebabkan oleh faktor individu dalam organisasi yang kurang antusias dalam melaksanakannya. Alshbiel dan Ahmad (2011) menyatakan semakin baik dan optimalnya sistem informasi yang dipergunakan dalam organisasi, akan dapat meningkatkan kemampuan SIA untuk menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Selanjutnya dengan baiknya kualitas pengambilan keputusan tersebut maka dapat meningkatkan kinerja organisasi keseluruhan. Sistem informasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan pemerintah pada masyarakat, agar kepercayaan masyarakat semaksimal mungkin kepada pemerintah. Karena output dari SIA ini sangat penting bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan menghasilkan laporan yang handal dan terpercaya, maka efektivitas SIA dalam organisasi pemerintah perlu untuk dipantau sebagai salah satu unsur penilaian kinerja pemerintah.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *stewardship* yang memandang bahwa eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, bertindak secara ekonomis dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, membuat pertanggungjawaban yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja, mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya serta menerapkan kepemimpinan yang efektif untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Oktavianus, 2001). Pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (*extra ordinary*) untuk memperbaiki keadaan, sehingga diperlukan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah yang tidak biasa pula. Dibenarkan dengan maraknya beberapa kasus penyelewengan dan penyimpangan yang kerap kali dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan itu sendiri. Dari keadaan tersebut sudah seharusnya pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan.

Pada aspek akuntabilitas, apabila akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakat diterapkan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan memunculkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga masyarakat akan menilai baik terhadap kinerja pemerintahan. Pada aspek transparansi, apabila informasi-informasi yang menjadi hak publik disampaikan oleh pemerintah secara transparan, akan menimbulkan suatu kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik. Dengan akuntabilitas dan transparansi yang baik, keadilan pada pelayanan publik dapat dicapai. Keadilan bisa diwujudkan apabila ada aturan yang disampaikan secara transparan dan hasil pelaksanaan yang disampaikan kepada masyarakat secara jelas sehingga masyarakat akan dapat membandingkan kualitas pelayanan yang diterimanya terhadap orang lain.

Keterwujudan akuntabilitas, transparansi dan keadilan pemerintah pada akhirnya akan dapat memberikan input pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mempersepsikan bahwa kinerja pemerintah adalah baik.

Selain ketiga prinsip tersebut, juga diperlukan dukungan dari sistem teknologi informasi yang memadai khususnya sistem informasi akuntansi. Sistem informasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan pemerintah pada masyarakat, agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi kepada pemerintah. Karena output dari SIA ini sangat penting bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan menghasilkan laporan yang handal dan terpercaya, maka efektivitas SIA dalam organisasi pemerintah perlu untuk dipantau sebagai salah satu unsur penilaian kinerja pemerintah. Semakin baik dan optimalnya sistem informasi yang digunakan dalam organisasi, akan dapat meningkatkan kemampuan SIA untuk menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Selanjutnya dengan baiknya kualitas pengambilan keputusan tersebut maka dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1:** Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
- H2:** Transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah
- H3:** *Fairness* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah
- H4:** Pemanfaatan *accounting system* memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah.
- H5:** Pemanfaatan *Accounting system* memperkuat pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah.
- H6:** Pemanfaatan *accounting system* tidak memperkuat pengaruh *fairness* terhadap kinerja instansi pemerintah.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdapat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang berjumlah sekitar 200 orang. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi wakil dari populasi tersebut yang berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini metode *purposive sampling*, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdapat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi lapangan yaitu pengumpulan data menggunakan kuesioner teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Deskriptif

**Statistik Deskriptif Variabel**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	50	26,00	40,00	31,5000	3,49489
Transparansi	50	19,00	30,00	24,0000	2,31234
Fairness	50	16,00	25,00	20,0000	2,05039
Sistem Informasi Akuntansi	50	18,00	30,00	26,3200	2,66067
Kinerja Instansi Pemerintah	50	17,00	25,00	19,8600	1,96925
Valid N (listwise)	50				

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai standar deviation yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini memiliki simpang data yang relatif rendah.

2. Uji Validitas

**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	R Hitung	Tabel r	Keterangan
Akuntabilitas	X1.1	0,752	0,278	Valid
	X1.2	0,688		Valid
	X1.3	0,648		Valid
	X1.4	0,664		Valid
	X1.5	0,605		Valid
	X1.6	0,762		Valid
	X1.7	0,846		Valid
	X1.8	0,754		Valid
Transparansi	X2.1	0,583	0,278	Valid
	X2.2	0,535		Valid
	X2.3	0,783		Valid
	X2.4	0,746		Valid
	X2.5	0,775		Valid
	X2.6	0,453		Valid
Fairness	X3.1	0,675	0,278	Valid
	X3.2	0,732		Valid
	X3.3	0,746		Valid
	X3.4	0,672		Valid
	X3.5	0,619		Valid
Kinerja Instansi Pemerintah	Y1	0,831	0,278	Valid
	Y2	0,762		Valid
	Y3	0,606		Valid
	Y4	0,725		Valid
	Y5	0,727		Valid
Sistem Informasi Akuntansi	M1	0,765	0,278	Valid
	M2	0,821		Valid
	M3	0,846		Valid
	M4	0,585		Valid
	M5	0,752		Valid
	M6	0,528		Valid

Sumber : Data Primer diolah 2020

Hasil pengujian validitas untuk seluruh item pernyataan menunjukkan bahwa memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar daripada tabel r. Hal ini berarti bahwa item-item pernyataan kuesioner yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

3. Hasil Uji Reliabilitas

**Hasil Uji Reliabilitas**

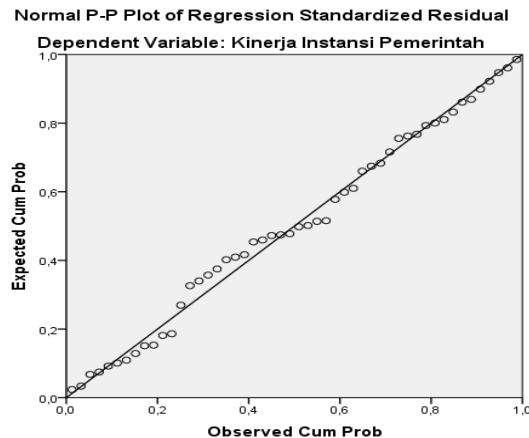
No	Variabel	Cronbach' Alpha	Keterangan
1.	Akuntabilitas	0,864	Reliabel
2.	Transparansi	0,731	Reliabel
3.	Fairness	0,713	Reliabel
4.	Kinerja Instansi Pemerintah	0,770	Reliabel
5.	Sistem Informasi Akuntansi	0,820	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah 2020

Hasil pengujian realibitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variable akuntabilitas, transparansi, *fairness*, kinerja instansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4. Uji Normalitas

### Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output SPSS 21 (2020)

Hasil Uji Normalitas menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal *probability plot* mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

5. Uji Multikolinieritas

### Hasil Uji Multikolinieritas

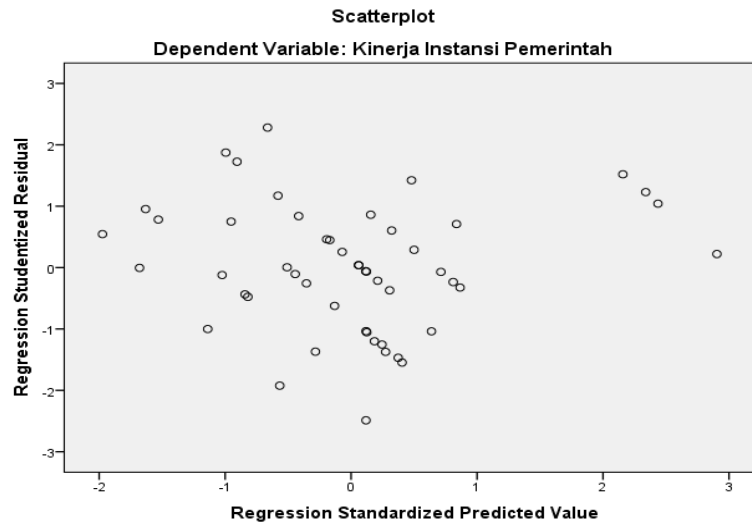
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Akuntabilitas	,584	1,713
Transparansi	,637	1,569
Fairness	,654	1,530
Sistem Informasi Akuntansi	,728	1,374

Sumber: Output SPSS 21 (2020)

Hasol uji multikolinieritas menunjukkan bahwa pengujian pada tabel nilai *tolerance* yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Di mana variabel akuntabilitas senilai 0,584, transparansi senilai 0,637, *fairness* senilai 0,654, sistem informasi akuntansi senilai 0,728. Adapun nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Untuk variabel akuntabilitas senilai 1,713, *transparansi* senilai 1,569, *fairness* senilai 1,530 dan sistem informasi akuntansi senilai 1,374. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen karena semua nilai *tolerance* variabel lebih besar dari 0,10 dan semua.

6. Uji Heteroskedastisitas

**Hasil Heteroskedastisitas**



Sumber: Output SPSS 21 (2020)

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi peningkatan penerimaan pajak berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan *fairness* yang di moderasi oleh sistem informasi akuntansi.

7. Hasil Uji Regresi Berganda

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,826 <sup>a</sup>	,682	,661	1,14703

Sumber: Output SPSS 21 (2020)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted r square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel 4.18 di atas nilai *adjusted square* sebesar 0,682. Hal ini menunjukkan bahwa 68% kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, transparansi, dan *fairness*. Sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

**Hasil Uji Simultan**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	129,499	3	43,166	32,809	,000 <sup>b</sup>
Residual	60,521	46	1,316		
Total	190,020	49			

Sumber: Output SPSS 21 (2020)

Hasil uji simultan dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil *f* hitung sebesar 32,809 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, di mana nilai *f* hitung 32.809 lebih besar dari nilai tabel *f* sebesar 2,81 ( $df_1=4-1=3$  dan  $df_2 =50-4= 46$ ). Berarti variabel akuntabilitas, transparansi, dan *fairness* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

**Hasil Uji Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,477	1,966		,243	,809
1 Akuntabilitas	,180	,056	,319	3,181	,003
Transparansi	,360	,088	,423	4,107	,000
Fairness	,254	,099	,265	2,572	,013

Sumber: Output SPSS 21 (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 0,477+ 0,180 X_1 -0,360 X_2 -0,254 X_3+ e.$$

8. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Uji Interkasiterhadap

**Hasil Uji Regresi Moderasi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	55,996	19,250		2,909	,006
Akuntabilitas	-1,399	,672	-2,483	-2,081	,044
Transparansi	-1,304	,631	-1,531	-2,066	,045
Fairness	1,538	,806	1,601	1,908	,063
1 Sistem Informasi Akuntansi	-1,838	,663	-2,484	-2,772	,008
X1_M	,053	,024	4,191	2,184	,035
X2_M	,062	,025	3,269	2,444	,019
X3_M	-,051	,031	-2,243	-1,666	,103

Sumber: Output SPSS 21 (2020)

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa variabel moderating X2\_M mempunyai t hitung sebesar 2,444>tabel t2,013dengan koefisien *understandardized* sebesar 0,062 dan tingkat signifikansi 0,019 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *system informasi akuntansi* memoderasi hubungan variabel transparansiterhadap kinerja instansi pemerintah. Jadi hipotesis kelima (H<sub>5</sub>) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti dan diterima.

**1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah akuntabilitasberpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitasberpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada variabel akuntabilitas terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,22 berada pada item pernyataan kelima. Sebagian besar pegawai BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan menganggap bahwa dengan adanya akuntabilitas maka kinerja para pegawai semakin meningkat, keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya



pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya penyelewengan sumber daya maupun pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi dan pelanggaran lainnya, dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh pada kinerja instansi pemerintah, apabila akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakat diterapkan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan memunculkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga masyarakat akan menilai baik terhadap kinerja pemerintahan (Zeyn, 2011). Berdasarkan *grand theory* dalam penelitian ini yaitu teori *agency* menjelaskan bahwa pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta memertanggungjawabkan segala sesuatu yang tugas yang dipercayakan masyarakat kepada pemerintah.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Putri (2015), Widiari dkk (2016), dan Pratolo (2010) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu unsur yang terpenting untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang bersih dan baik, dengan adanya akuntabilitas tentunya akan mendorong kinerja instansi pemerintah bekerja dengan optimal dalam menjalankan program-program pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan publik, karena instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Azlina dan Amelia (2014) mengatakan bahwa yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah adalah pengendalian internal dari instansi tersebut, dengan adanya pengendalian internal mampu meningkatkan kedisiplinan para pegawai dalam suatu instansi. Selain itu penelitian Istiqomahtunnisa (2017) juga menyatakan bahwa yang dapat mencegah terjadinya kecurangan yaitu adanya pengendalian internal dan gaya kepemimpinan.

## 2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Pada variabel transparansi, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,22 berada pada item pernyataan keenam. Sebagian besar pegawai BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan menganggap bahwa penerapan transparansi memang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, khususnya pada BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak di bidang keuangan harus lebih transparansi dalam memberikan informasi kepada pimpinan maupun masyarakat. Transparansi, apabila informasi-informasi yang menjadi hak publik disampaikan oleh pemerintah secara transparan, akan menimbulkan suatu kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transparansi* berpengaruh pada kinerja instansi pemerintah. Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong kinerja pemerintah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program-program pemerintah serta dalam pengambilan keputusan publik (Lestiawan dan Jatmiko, 2016). Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Andreana dan Wirajaya, 2018). Sejalan dengan *grand theory* dalam penelitian ini yaitu teori *agency* yang menjelaskan bahwa semakin jelas informasi yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah maka akan mengurangi asimetri informasi. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya penyelewengan sumber daya maupun pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi dan pelanggaran lainnya.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Auditya dan Lismawati (2013), Lestiawan dan Jatmiko (2016). dan Pratolo (2010) yang menyatakan bahwa penerapan aspek transparansi, secara logis apabila informasi-informasi yang menjadi hak publik disampaikan oleh pemerintah secara transparan, akan menimbulkan suatu

kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik. Lain halnya dengan penelitian Intihanah dan Muthia (2016) mengatakan bahwa partisipasi anggaran yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah.

### 3. Pengaruh *Fairness* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Hipotesis kedua (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah *fairness* berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *fairness* berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Pada variabel *fairness*, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,30 berada pada item pernyataan kedua. Sebagian besar pegawai BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan menganggap bahwa penerapan *fairness* memang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, khususnya pada BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak di bidang keuangan. Dengan menerapkan *fairness* akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fairness* berpengaruh pada kinerja instansi pemerintah. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kecemburuan social dalam lingkungan internal pemerintahan daerah. Selain itu, keadilan juga harus diterapkan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, tanpa memandang status sosial (Lestiawan dan Jatmiko, 2016). Berdasarkan *grand theory* penelitian ini, yaitu *agency theory*, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan *fairness* akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Anderana dan Wirajaya, (2018) Partolo (2008). yang menyatakan bahwa penerapan penerapan prinsip keadilan mempunyai peran penting untuk memajukan kinerja instansi pemerintah. Penerapan prinsip keadilan padalingkungan pemerintahan dapat terlihat dari perlakuan pemerintah yang bersikap tegas terhadap pegawai yang kurang disiplin atau menyalahgunakan wewenang. Saat keadilan dapat tercipta dilingkungan tersebut, pegawai tidak akan berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan pemerintahan. Lain halnya dengan penelitian Coryanata (2007) mengatakan bahwa yang dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah pengetahuan dan wawasan tentang anggaran dan pengawasan yang baik.

### 4. Pengaruh Pemanfaatan *Accounting System* dalam Memoderasi Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemanfaatan *accounting system* dalam memoderasi akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uji interaksi menunjukkan bahwa variabel koefisien beta unstandardized sebesar 0,053 dan tingkat signifikansi 0,035 yang lebih kecil dari 0,05, pemanfaatan *accounting system* dianggap variabel moderating apabila tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H<sub>4</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan *accounting system* merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel akuntabilitas terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah. Jadi hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau diterima.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan akuntabilitas juga perlu didukung oleh teknologi informasi yang memadai seperti system akuntansi dapat

menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu dan membantu pemerintahan dalam pengambilan keputusan yang tepat (Sajady dkk, 2008).

Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan efektif apabila sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan memenuhi harapan secara tepat waktu (*timely*), akurat (*accurate*), dan dapat dipercaya (*reliable*), dimana dalam mewujudkannya dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai dan maksimal. Instansi pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan Pemerintah, mengingat bahwa dari tahun ketahun volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin rumit, dan kompleks. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Mahayuni dkk, 2017). Semakin baik penyajian informasi dan laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

#### **5. Pengaruh Pemanfaatan Accounting System dalam Memoderasi Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.**

Hipotesis kelima (H5) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemanfaatan *accounting system* dalam memoderasi transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil ujiinteraksi menunjukkan bahwa variabel koefisien beta unstandardized sebesar 0,062 dan tingkat signifikansi 0,019 yang lebih kecil dari 0,05, pemanfaatan *accounting system* dianggap variabel moderating apabila tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H<sub>5</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan *accounting system* merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel transparansi terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah. Jadi hipotesis kelima (H<sub>5</sub>) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau diterima.

Pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (*extra ordinary*) untuk memperbaiki keadaan, sehingga diperlukan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah yang tidak biasa pula. Jangan sampai timbul kesan bagi para pejabat pemerintah, asalkan tidak melanggar undang-undang dan haluan negara yang penting tetap bertahan sampai akhir masa jabatan. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntability) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan (Istiqomahunnisa, 2017)

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang terkomputerisasi akan sangat mendukung dalam proses transparansi pelaporan keuangan. Diimbangi dengan pengawasan yang ketat pada keuangan daerah tersebut, maka laporan keuangan daerah dapat disajikan secara transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Mahayuni dkk (2017) pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Menurut penelitian Wahyuni (2014) yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan dan akseibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan akseibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **6. Pengaruh Pemanfaatan Accounting System dalam Memoderasi Fairness Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Hipotesis keenamt (H6) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemanfaatan *accounting system* dalam memoderasi *fairness* terhadap kinerja instansi

pemerintah. Berdasarkan hasil ujiinteraksi nilai koefisien beta unstandardized sebesar -0,051 dan tingkat signifikansi 0,103 yang lebih besar dari 0,05. pemanfaatan *accounting system* dianggap variabel moderating apabila tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka  $H_6$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan *accounting system* bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel *fairness* terhadap kinerja instansi pemerintah. Maka hipotesis keenam ( $H_6$ ) yang diajukan dalam penelitian ini tidak terbukti atau ditolak.

Prinsip keadilan mempunyai peranan penting untuk memajukan kinerja pemerintah. Saat keadilan dapat tercipta dilingkungan pemerintah, pegawai maupun masyarakat tidak akan berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan pemerintah setempat. Dengan demikian segala bentuk pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisir, semakin sedikit atau kurang pelanggaran atau masalah yang terjadi pada pemerintah daerah maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.

Semakin baik pengaplikasian prinsip keadilan dalam suatu instansi, maka dapat meningkatkan pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan melalui pengawasan yang akuntabel dan berkeadilan, sehingga dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Aprijana, 2014). Hal tersebut membuktikan bahwa efektifnya penerapan prinsip keadilan pada suatu organisasi tidak memerlukan adanya sistem informasi akuntansi karena yang menjadi tolak ukur terlaksananya penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari keterlibatan para pegawai maupun pimpinan dari organisasi tersebut dalam mewujudkan prinsip *fairness* itu sendiri. Dengan demikian, pemanfaatan *accounting system* tidak memoderasi hubungan *fairness* terhadap kinerja instansi pemerintah karena prinsip keadilan dapat berjalan dengan efektif melalui peran masing-masing elemen yang berkaitan dalam hal ini pegawai dalam instansi pemerintahan dalam mewujudkan prinsip keadilan (*fairness*) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan meminimalisir segala bentuk kecurangan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi dan *fairness* terhadap variabel dependen yaitu kinerja instansi pemerintah serta adanya interaksi variabel moderasi yaitu pemanfaatan *accounting system*.

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *akuntabilitas* berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti semakin baik pengaplikasian akuntabilitas yang dimiliki oleh para pegawai BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan maka kinerja yang dihasilkan juga akan semakin baik. Apabila akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakat diterapkan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan memunculkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga masyarakat akan menilai baik terhadap pegawai BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Sebagian besar pegawai BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan menganggap bahwa penerapan transparansi memang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, khususnya pada BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak di bidang keuangan harus lebih transparansi dalam memberikan informasi kepada pimpinan maupun masyarakat. Transparansi, apabila informasi-informasi yang menjadi hak publik disampaikan oleh pemerintah secara transparan, akan menimbulkan suatu kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik.
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *fairness* berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Sebagian besar pegawai BPKAD Provinsi

- Sulawesi Selatan menganggap bahwa penerapan *fairness* memang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, khususnya pada BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak di bidang keuangan. Dengan menerapkan *fairness* akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik.
4. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi menunjukkan bahwa pemanfaatan *accounting system* memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan akuntabilitas juga perlu didukung oleh teknologi informasi yang memadai seperti system akuntansi dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu dan membantu pemerintahan dalam pengambilan keputusan yang tepat.
  5. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi menunjukkan bahwa pemanfaatan *accounting system* memoderasi hubungan transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini membuktikan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan yang terkomputerisasi akan sangat mendukung dalam proses transparansi pelaporan keuangan. Diimbangi dengan pengawasan yang ketat pada laporan keuangan tersebut, maka laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
  6. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi menunjukkan bahwa pemanfaatan *accounting system* tidak memoderasi hubungan *fairness* terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut membuktikan bahwa efektifnya penerapan prinsip keadilan pada suatu organisasi tidak memerlukan adanya sistem informasi akuntansi karena yang menjadi tolak ukur terlaksananya penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari keterlibatan para pegawai maupun pimpinan dari BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dalam mewujudkan prinsip *fairness* itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. 2012. Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah. *Public Interest Research and Advocacy Center*. Hal 1-12
- Alfian, Mohammad. 2014. Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD. *Economics & Business Research Festival*. 1698-1712.
- Alshbiel, Seif Obeid dan Al-Awaqleh Qasim Ahmad. 2011. Factors Affecting the Applicability of the Computerized Accounting System. *International Research Journal of Finance and Economics*. 6(4), 37-53.
- Andreanna, Made Oka Candra dan I Gde Ary Wirajaya. 2018. Pengaruh *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 23(2):1305-1331.
- Aprijana, A.A.Gede Rahadi., Made Pradana Adiputra, dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Pemahaman *Good Governance* dan Keahlian Profesional Dalam Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan. *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1):1-12.
- Arsyad, Syahcruel. 2019. Pejabat Penghambat Kinerja Pemerintahan Di Sulsel Bakal Dimutasi. *Sindonews.Com*. <https://makassar.sindonews.com>
- Auditya, Lucy dan Husaini Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Fairness*. 3(1):21-41.

- Azlim, Darwanis dan Usman Abu Bakar. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi*. 1(1):1-14
- Azlina, Nur dan Ira Amelia. 2014. Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. 12(2): 32-42.
- Boy, Deny. Siringoringo dan Hotniar. 2009. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 12(14):1-11
- Coman, Narcisa Andrei & Uta, Tatiana. 2011. Particularities of the Accounting Information System in the Scientific Academic Institution from Romania. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 1(5),2449-2453.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas. Makasar*.
- Darmawati, Deni. 2015. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja dan Resiko Perbankan di Indonesia. *Finance and Banking Journal*, 17(1): 83-97.
- Damayanthi, IGA Eka dan Ni Luh Made Sierrawati. 2012. Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan Pengguna Teknologi Informasi terhadap Kinerja Individual pada Koperasi Simpan Pinjam di Kec. Denpasar Barat. *Jurnal Riset Akuntansi*. 32-45.
- Dewi, Elvia Puspa. 2018. Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*. 7(2): 81-108.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gupta M.P, Kanungo S, Kumar R dan Sahu G.P. 2007. A Study of Information Technology Effectiveness in Select Government Organizations in India. *Journal for Decision Makers*. 32(2).
- Handayani, R. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Efektivitas Sistem Informasi pada Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1):1-26.
- Himawan. 2019. Kinerja Buruk, Gubernur Sulawesi Selatan Pecat Pejabat Pemrov. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com>
- Hutapea, Febrina Lastiar, dan Aristanti Widyaningsih. 2017. Pengaruh Good Governance dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemrov Di Indonesia). *Jurnal Aset*. 9(1):173-186.
- Iman Zare. 2012. Study of effect of accounting information systems and softwares on qualitative features of accounting information. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 1(4).
- Intihanah dan Nur Afifa Muthia S. 2016. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 67-79.
- Ismanto, Agus. 2010. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Individu Mahasiswa Jurusan Akuntansi Perbanas Surabaya*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.(2):354-369.
- Istiqomahtunnisa. 2017. Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jom Fekom*. 4(1): 724-738.
- Jensen, M. C dan W. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics* 3: 305-360.
- Kuncoro Ph.D, Mudrajad. 2013. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 4. Erlangga, Jakarta.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat ukurr Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi: Sekretariat *Good Publik governance*. BAPPENAS. Jakarta.
- Kristiadi, J.B. 1999. Aparatur Hendaknya Tinggalkan Sikap 'Ambtenaar'. [INDONESIAP] ANTARA-[apakabar@clark.net](mailto:apakabar@clark.net). 19 Agustus.

- Lestiawan, Handi Yuniar dan Bambang Jatmiko. 2016. Key Succes factor Goog Government Governance Serta PEngaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah. *Maksimum*. 5(1):32-49.
- Mahayuni, Ni Putu Sri, Gede Adi Yuniarta, dan Putu Julianto. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Karangasem. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*. 8(2):1-12.
- Moe, T. M. 1984. The new economics of organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.
- Muljo, Hery Harjono, Heny Kurniawati, dan Pahala. 2014. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran. *Binus Business Review*. 5(2): 537-550.
- Mulyana, B. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1):1-11.
- Ogah, Idagu Joseph. 2013. An Evaluation of the Relevance of Accounting Systems as a Management Decision Tool in Union Bank of Nigeria Plc, Uyo Branch of Akwa Ibom. *Greener Journal of Business and Management Business Study*, 3 (1): 38-45.
- Paranoan, Natalia, Christina Jeane Tandirerung dan Anthon Paranoan. 2019. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Akun Nabelo*. 2(1):181-196.
- Pratolo, S. 2007. *Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen serta Tinjauannya pada Perusahaan*, *Proceeding SNA X, 2007*. 1-14
- Pratolo, Suryo. 2008. Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan KEadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. 9(2):108-124.
- Pratolo, 2010. Peran Good Government Governance untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah dalam Menghadapi Tantangan Global. *Simposium Riset Ekonomi IV*. 1-15.
- Putri, Egrinaen Mauliziska Nugraheni. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *JOM Fekom* 2(2):1-15.
- Rahmawati, dan Halim Usman. 2014. Pengaruh Beban Kerja dan Pengalaman Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1): 68-79.
- Rosliyati, Ati. 2014. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*. 1(2):66-79.
- Sa'adah, Binti. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui *E-Government. Kebijakan dan Manajemen Publik*. 3(2):1-10.
- Sajady, H., Dastgir, M., Hashemnejad. 2008. Evaluation of the effectiveness of accounting information systems. *International Journal of Information Science and Technology*. 6(2):1-13.
- Saputra, Devi Satria, Darwanis dan Syukriy Abdullah. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi*.3(2):76-84.
- Sayuti, Sayuti, Jamaluddin Majid, dan Muhammad Sapril Sardi Juardi. PERwujudan Nilai Transaparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1(1):16-28.
- Sohuturon, Martahan. 2018. Kepala Keuangan Makassar Jadi Tersangka Korupsi Anggaran Kota. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>



- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suzetta, Paskah. 2008. Pemerintah Terus Perbaiki Kinerja Aparatur Negara. Nasional Aktual. Jakarta. CyberNews. 1 Desember 2019. 13:38 wib.
- Uar, Aty. 2016. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*,6(1): 1-11.
- Utama, Daniel Aditya, dan Rediana Setiyani. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*. 9(2):100-114.
- Venkatesh V, Moris, M.G, Davis, G.B, dan Davis F.D. 2003. User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*. 27(3), 425- 475.
- Wahyuni, P. S., Sulindawati, N. L. G. Erni, dan H. N. Trisna. 2014. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintahan Kabupaten Badung). *e-Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*.. 2(1):24-35.
- Widiari, Putu Ayu, I Dewa Nyoman Badera, dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri. 2016. Pengaruh Good Government Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 5(8):2353-2380.
- Witjaksono. 2006. Kinerja Layanan Publik Harus Dibenahi. *haridinata@yahoo.com*. 4 Desember 2019
- Wiranto, Tatang. (2012). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik*. (online). (diakses tanggal 28 November 2019). Tersedia di World Wide Web: <http://www.depkominform.go.id>
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*. 1(1): 21-37.